



DIY Belum Mampu Lockdown

JOGJA—Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro di DIY akan diperketat seiring naiknya kasus Covid-19 akhir-akhir ini. Opsi *lockdown* wilayah tidak memungkinkan dipilih di Bumi Mataram.

Sunartono
sunartono@harianjogja.com

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X, menegaskan DIY tidak memungkinkan *lockdown* secara total. Sebab, pemerintah daerah tidak kuat menanggung

dampak dari penutupan aktivitas masyarakat secara total. Oleh karena itu, keputusan terakhir untuk mengurangi penyebaran Covid-19 tetap dengan PPKM

► Sultan mengakui salah satu sumber kerumunan di DIY adalah tempat wisata sehingga perlu dilakukan penutupan selama dua hari.

► Persi DIY mengusulkan penggunaan gedung SD negeri sebagai seiter

Mikro lebih diperketat.

"Ya enggak [*lockdown*] to, enggak ada kalimat [akan menetapkan kebijakan] *lockdown*, saya enggak kuat suruh *nragati* [membiayai] rakyat se-DIY," kata Sultan usai rapat bersama Bupati dan Wali Kota di kompleks Kepatihan, Senin (21/6) petang.

Menurut Sultan, *lockdown* itu pilihan terakhir dan di sisi lain pemerintah tidak kuat membiayai sehingga keputusan tetap pada PPKM Mikro. Pemerintah Pusat

sudah menetapkan kebijakan penanganan Covid-19 ini dengan keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi, bukan *lockdown*.

PPKM Mikro, lanjutnya, sebenarnya sudah lebih detail tertuang di Instruksi Gubernur DIY dan ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati dan Wali Kota dengan urusan yang sama yaitu membatasi pergerakan atau mobilitas masyarakat.

► Halaman 10

DIY Belum...

Keberadaan Satgas di level keturahan menjadi sangat penting perannya, sehingga keturahan yang belum memiliki diminta untuk segera membentuk.

"*Lockdown* itu pilihan terakhir, saya sudah bilang, *lockdown* tetapi pemerintah tidak akan kuat. Jadi ya tetap PPKM to, keputusannya tetap PPKM," katanya.

Ia menambahkan jangan mudah menyatakan *lockdown*, karena pengertian *lockdown* total sehingga tidak ada orang jualan, yang buka hanya apotek, toko obat dan supermarket, yang lain tutup.

Dengan tidak memungkinkan dilakukan *lockdown*, Sultan meminta penerapan PPKM Mikro harus diperketat dengan mengurangi mobilitas agar tidak terjadi kerumunan. Sultan mengakui salah satu sumber kerumunan di DIY adalah tempat wisata sehingga dilakukan penutupan selama dua hari seperti dilakukan di Bantul.

Namun Raja Ngayogyakarta Hadiningrat ini berharap sebelum ditutup harus dibicarakan dengan

berbagai pihak seperti pedagang. Penutupan dua hari saja dalam dua bulan tentu bisa menjadi kebijakan yang seimbang. Namun kebijakan penutupan tempat wisata itu sepenuhnya diserahkan kepada bupati dan wali kota dengan melihat kondisi daerah masing-masing.

Terkait dengan jumlah *bed* rumah sakit yang terus menurun juga telah dikoordinasikan dengan pihak rumah sakit, bupati dan wali kota. Selain ketersediaan *bed*, oksigen juga menjadi bahasan penting dan perlu diantisipasi agar tidak terjadi kekurangan.

Gedung SD

Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi) DIY mengusulkan penggunaan gedung SD negeri sebagai selter di level pedesaan jika kesulitan tempat. Ketua Persi DIY, Darwito, berharap semua pihak menjadikan persoalan Covid-19 ini sebagai tanggung jawab bersama umat manusia. Sehingga harus ada kesadaran menanggung beban penyelesaian secara bersama.

Ia menambahkan di tengah

keterbatasan rumah sakit karena lonjakan pasien Covid-19 maka selter bisa menjadi solusi. Konsep selter di pedukuhan sebenarnya telah banyak direncanakan dan saat ini beberapa desa sudah memiliki, hanya saja masih perlu ditingkatkan fasilitasnya.

Darwito mengusulkan gedung SD negeri di berbagai desa di perkampungan agar diubah menjadi selter sementara. Karena gedung tersebut milik pemerintah sehingga tinggal menambah fasilitas seperti tempat tidur.

Ia menilai penggunaan gedung SD negeri sebagai selter tidak membahayakan ke depannya, karena jika telah selesai bisa disterilkan. Selain itu selter tersebut hanya untuk pasien tanpa gejala.

Ia menggambarkan, misalnya pasien berat butuh ICU kemudian sudah sehat dan tidak ada lagi gejala, tetapi hasil *polymerase chain reaction* (PCR) masih positif, bisa dipindahkan dari rumah sakit ke selter, sehingga *bed* di RS bisa diisi lagi dengan pasien baru yang bergejala sedang.

Tetapi SD negeri itu ya, kalau swasta kan harus konsultasi dengan yayasan setuju atau tidak," ujarnya.

Menurutnya keberadaan gedung SD negeri sebagai selter akan membuat orang yang positif Covid-19 lebih bersedia ditampung karena berdekatan dengan tempat tinggalnya. Berbeda ketika selternya jauh dari rumah sehingga secara psikologi pasien akan terganggu.

Isolasi mandiri di rumah tidak sepenuhnya direkomendasikan, terutama jika kamar tidur dan kamar mandi terbatas. "Enggak bisa isolasi mandiri di rumah dengan kondisi seadanya," kata dia.

Misalnya isolasi mandiri di rumah tidak ada yang memberi makanan, dia harus membeli makanan di warung. Oleh karenanya, penting bagi OTG untuk isolasi di desa atau pedukuhan.

Ia juga merespons Pemda DIY yang berupaya menggeser *bed* pasien umum ke pasien Covid-19. Menurutny hal itu tidak efektif. Lebih baik selter desa atau pedukuhan digarap dengan benar, difasilitasi, bisa

bekerja sama dengan puskesmas, perguruan tinggi yang memiliki fakultas kedokteran atau kesehatan masyarakat.

Darwito mengakui adanya lonjakan jumlah pasien Covid-19 cukup membuat pelayanan sejumlah rumah sakit terganggu.

Jika suatu rumah sakit dipenuhi pasien Covid-19, kesempatan pasien umum mendapatkan perawatan ikut terganggu. "Contohnya pasien yang seharusnya perlu operasi jantung, dia enggak bisa operasi karena ICU dipakai pasien Covid-19. *Bed* diperuntukkan pasien Covid-19 semuanya terdampak, termasuk nakes. Kalau nakesnya mengurus Covid-19 yang terus membeludak maka kecapekan atau yang harusnya libur terpaksa harus masuk," katanya.

Ia mengatakan pasien non-Covid juga harus mendapatkan perhatian dan tidak memungkinkan jika harus memperpendek durasi perawatan. Penetapan durasi perawatan tergantung suatu kebutuhan pasien sesuai dengan standar keselamatannya.

Tambah Selter

Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji mengatakan berdasarkan laporan kabupaten dan kota sudah direncanakan menambah beberapa selter. Ia menilai tidak perlu menggunakan hotel seperti Hotel Mutiara secara khusus, karena dengan membangun selter di desa-desa akan memudahkan warga yang terkonfirmasi positif untuk diisolasi.

"Saya kira konsentrasi penambahan ada di kabupaten dan kota kalau diperlukan pembiayaan seperti logistik nanti provinsi mendukung. Enggak usah di hotel di selter-selter yang tersebar di desa-desa kecamatan akan lebih baik karena mendekatkan yang bersangkutan," katanya.

Aji juga merespons positif usulan dari Persi DIY yang menyarankan agar menggunakan gedung SD negeri sebagai selter Covid-19.

"Itu beberapa bekas sekolah ada yang dipakai, karena sekolah yang tidak dipakai itu biasanya milik desa, itu memungkinkan. Bahkan kalau kepepet betul, sekolah yang masih aktif bisa saja dipakai," katanya.

PPKM MIKRO DIPERKUAT

Pemerintah memutuskan penguatan dan perubahan aturan ketentuan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. Penguatan mulai berlaku Selasa (22/6), hingga 5 Juli mendatang

Kegiatan Perkantoran/Tempat Kerja Perkantoran Pemerintah (Kementerian/ Lembaga/Daerah)

- Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta
- Zona Merah:** WFH 75% dan WFO 25%
- Zona Lainnya:** WFH 50% dan WFO 50%
- Penerapan protokol kesehatan lebih ketat, pengaturan waktu kerja bergiliran, saat WFH tidak bermobilitas ke daerah lain.
- Pengaturan lebih lanjut dari K/L terkait dan Pemerintah Daerah.

Kegiatan Restoran

- Warung makan, Rumah makan, Restoran, Kafe, Pedagang Kaki Lima, Lapak jajanan, baik yang berdiri sendiri maupun di Pusat Perbelanjaan/Mall
- Makan/minum di tempat, paling banyak 25% kapasitas.
- Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB.
- Layanan pesan-antar/dibawa pulang sesuai jam operasional restoran.
- Penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Kegiatan Konstruksi

- Kegiatan Konstruksi
- Dapat beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Kegiatan di Area Publik

- Area publik (Fasilitas umum, Taman umum, Tempat Wisata umum, area publik lainnya)
- Zona Merah:** ditutup sementara sampai dinyatakan aman.
- Zona Lainnya:** diizinkan dibuka paling banyak 25% kapasitas, pengaturan dari pemerintah daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.



Transportasi Umum

- Kendaraan umum, Angkutan massal, Taksi (konvensional dan online), Ojek (online dan pangkalan), Kendaraan sewa/rental
- Dapat beroperasi, dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional oleh pemerintah daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.



Kegiatan Belajar Mengajar

- Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan
- Zona Merah:** dilakukan secara Daring.
- Zona Lainnya:** sesuai pengaturan dari Kementerian Dikbudristek, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Kegiatan Sektor Esensial

- Lokasi sektor esensial, industri, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional, Tempat pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan, super market), baik yang berdiri sendiri maupun di Pusat Perbelanjaan/Mall
- Dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.



Kegiatan di Pusat Perbelanjaan/Mall

- Pusat perbelanjaan, Mall, Pusat Perbelanjaan
- Pembatasan jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB.
- Pembatasan pengunjung paling banyak 25% kapasitas.

Kegiatan Seni, Budaya, Sosial Kemasyarakatan

- Lokasi kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan
- Zona Merah:** ditutup sementara sampai dinyatakan aman.
- Zona Lainnya:** diizinkan dibuka paling banyak 25% kapasitas, pengaturan dari pemerintah daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat. Kegiatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% kapasitas, tidak ada hidangan makanan di tempat.

Kegiatan Ibadah

- Tempat Ibadah (Masjid, Musala, Gereja, Pura, Tempat Ibadah lainnya)
- Zona Merah:** ditiadakan sementara sampai dinyatakan aman.
- Zona Lainnya:** sesuai pengaturan dari Kementerian Agama, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Rapat, Seminar, Pertemuan Luring

- Lokasi Rapat/Seminar/Pertemuan, di tempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan
- Zona Merah:** ditutup sementara sampai dinyatakan aman.
- Zona Lainnya:** diizinkan dibuka paling banyak 25% kapasitas, pengaturan dari pemerintah daerah, dengan penerapan protokol kesehatan lebih ketat.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 13 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005